

ANALISIS KETIMPANGAN DALAM PELAKSAAN PROGRAM BEKASI SEHAT OLEH BAZNAS KABUPATEN BEKASI

Asiyah Jamilah¹, Suliwa², Ayi Puspita Sari³, Laily Fatchiyah Lusiana⁴, dkk
STAI Haji Agus Salim Cikarang
Asiyah@staihas.ac.id

Abstract

This study examines the factors causing inequality in the distribution of aid within the Bekasi Sehat Program by BAZNAS Bekasi Regency. Internal issues, such as inadequate planning, limited human resources, and ineffective monitoring, hinder aid distribution. External factors, including bureaucratic complexity and lack of public awareness, further exacerbate the problem. These disparities result in inefficiencies, limiting the program's impact on underserved communities. To enhance distribution effectiveness, strategic improvements in planning, resource allocation, and transparency are essential. Strengthening public outreach and simplifying administrative procedures can also help ensure more equitable aid distribution.

Keywords: *Inequality, Health Aid, BAZNAS, Bekasi Sehat, Distribution*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan Program Bekasi Sehat oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi. Faktor internal seperti perencanaan yang kurang optimal, keterbatasan SDM, dan lemahnya pemantauan menghambat distribusi bantuan. Faktor eksternal, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya sosialisasi, memperburuk kondisi ini. Ketimpangan ini menyebabkan efektivitas program tidak maksimal dalam menjangkau masyarakat miskin. Diperlukan perbaikan strategis dalam perencanaan, alokasi sumber daya, dan transparansi. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur administrasi dapat membantu memastikan distribusi bantuan yang lebih merata dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Ketimpangan, Bantuan Kesehatan, BAZNAS, Bekasi Sehat, Distribusi

PENDAHULUAN

Salah satu hak dasar warga negara Indonesia yang telah dijamin UUD 1945 dalam pasal 28H adalah kesehatan, melalui berbagai kebijakan dan program, berupaya memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok yang tergolong fakir miskin dan dhuafa. Untuk mengatasi kesenjangan ini, berbagai lembaga dan organisasi sosial turut berperan dalam memberikan bantuan kesehatan, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Bekasi melalui program Bekasi Sehat. Program tersebut memiliki tujuan membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapat layanan kesehatan, baik melalui bantuan biaya pengobatan maupun penyediaan alat kesehatan.¹ Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan, yang perlu dianalisis lebih lanjut.

¹ Dewi, A., Himmawan, D., & Syathori, A. (2023). Analisis penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu. *JSEF*, 2(2), 100. (<https://doi.org/10.31943/jsef.v2i2.32>)

Program Bekasi Sehat memiliki peran penting dalam memberikan akses kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi. Bantuan yang diberikan mencakup biaya pengobatan bagi orang yang menjalani perawatan di rumah. Selain itu, program ini juga menyediakan alat bantu kesehatan seperti kaki dan tangan palsu, kursi roda, alat bantu dengar, serta fasilitas jamban sehat. Dana yang digunakan berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS. Hingga Desember 2023, tercatat sebanyak 778 orang mustahik telah menerima manfaat dari program ini, dengan total dana yang telah disalurkan mencapai Rp689.622.300. Meskipun program ini telah membantu banyak masyarakat, masih terdapat berbagai kendala dalam penyaluran bantuan yang menyebabkan ketimpangan, baik dari segi jumlah penerima, efektivitas distribusi, maupun transparansi dalam pengelolaannya. (BAZNAS, 2023)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan adalah keterbatasan anggaran dan kriteria penerima manfaat yang ketat. Meskipun program ini tidak membatasi jumlah penerima bantuan, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan setiap bulan berfluktuasi. Dalam beberapa bulan, jumlah penerima bisa mencapai 80 orang, sementara di bulan lain hanya sekitar 20 orang. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam distribusi bantuan, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau faktor administratif dalam proses verifikasi penerima manfaat. Selain itu, persyaratan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sering menjadi kendala bagi masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak memiliki dokumen tersebut. Proses pengurusan SKTM yang memakan waktu dan birokrasi yang panjang sering kali menghambat akses masyarakat terhadap bantuan kesehatan yang seharusnya bisa mereka peroleh.

Selain kendala administratif, keterbatasan sumber daya manusia dan mekanisme distribusi juga berkontribusi terhadap ketimpangan dalam penyaluran bantuan. BAZNAS Kabupaten Bekasi sudah menjalin kemitraan dengan beberapa rumah sakit, seperti RSUD Kabupaten Bekasi dan RS An-Nisa, dalam menyalurkan bantuan bagi pasien yang mengalami tunggakan pembayaran. Namun, dalam beberapa kasus, penyaluran bantuan tidak selalu merata karena adanya kendala teknis dalam pendataan pasien dan keterlambatan dalam pencairan dana. Bantuan yang disalurkan langsung ke rumah sakit untuk menutupi tunggakan pasien memang bertujuan menghindari penyalahgunaan dana, tetapi mekanisme ini juga berisiko menimbulkan ketimpangan jika tidak dilakukan dengan sistem pendataan yang transparan dan terintegrasi. Akibatnya, beberapa pasien yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan dalam proses distribusi.

Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan dalam program Bekasi Sehat adalah mekanisme pengajuan bantuan yang bersifat aktif. Meskipun seseorang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, mereka tetap harus mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu agar dapat menerima manfaat dari program ini. Artinya, jika ada masyarakat miskin yang tidak mengetahui adanya program ini, kesulitan dalam mengurus persyaratan, atau tidak memiliki akses untuk mengajukan permohonan, mereka tidak akan mendapatkan bantuan. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan dalam distribusi, di mana hanya mereka yang memiliki informasi dan kemampuan administratif yang dapat mengakses bantuan, sementara yang lainnya meskipun dalam kondisi lebih membutuhkan tidak terakomodasi dalam program ini.

Ketimpangan dalam penyaluran bantuan pada program Bekasi Sehat menjadi perhatian penting yang harus dikaji secara mendalam. Sebagai program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, efektivitas dan keadilan dalam distribusi bantuan harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan

ketimpangan ini, baik dari aspek kebijakan, administrasi, maupun pelaksanaan di lapangan.² Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar lebih merata, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, program Bekasi Sehat dapat semakin optimal dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini adapun metode yang dilakukan yaitu kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam bersama pejabat BAZNAS yang terlibat langsung dalam program Bekasi Sehat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi terkait proses pengajuan bantuan, kendala yang dihadapi, serta cara penyaluran bantuan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Bekasi Sehat

Program Bekasi Sehat merupakan salah satu inisiatif BAZNAS Kabupaten Bekasi yang bertujuan membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan akses kesehatan. Bantuan yang diberikan mencakup biaya pengobatan bagi pasien yang dirawat di RS atau yang melakukan pengobatan di rumah. Selain itu, program ini juga menyediakan alat bantu kesehatan seperti kaki dan tangan palsu, kursi roda, alat bantu dengar, serta fasilitas sanitasi seperti jamban sehat.

Sumber pendanaan program ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. Hingga akhir tahun 2023, program ini telah memberikan manfaat kepada ratusan mustahik dengan jumlah dana keseluruhan yang telah dibagikan mencapai angka ratusan juta rupiah.³ Namun, dalam praktiknya, distribusi bantuan masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan ketimpangan dalam penerimaannya.

2. Faktor – faktor Penyebab Ketimpangan

Ketimpangan dalam penyaluran bantuan Program Bekasi Sehat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi terpengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan ke dalam 2 aspek utama, yaitu permasalahan internal dan eksternal. Faktor-faktor ini menjadi hambatan dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar merata, transparan, dan tepat sasaran.

a) Permasalahan Internal

Permasalahan internal berkaitan dengan kelemahan dalam sistem dan manajemen BAZNAS Kabupaten Bekasi yang berdampak pada efektivitas program. Salah satu kendala utama adalah perencanaan program yang belum matang. Perencanaan yang kurang terstruktur menyebabkan distribusi bantuan tidak merata dan kurang tepat sasaran, sehingga program tidak dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan awalnya.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendamping juga menjadi faktor penghambat. Pendamping program memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bantuan diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Namun, minimnya tenaga pendamping

² Rakhmat, & Firdaus. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(2), 35.

³ Saputra, A. D. (2024). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kabupaten Bekasi (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*). 38

yang memiliki kompetensi tinggi menyebabkan kesulitan dalam pemantauan dan evaluasi program, yang pada akhirnya berpengaruh pada efektivitas pelaksanaannya.⁴

Kendala lainnya adalah belum tersedianya alat ukur yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan program. Tanpa indikator yang terukur, BAZNAS Kabupaten Bekasi mengalami kesulitan dalam menilai apakah program telah berjalan sesuai harapan atau masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Ketidakjelasan dalam evaluasi ini dapat berujung pada ketimpangan dalam distribusi bantuan serta kurangnya transparansi dalam pengelolaannya.

b) Permasalahan Eksternal

Selain tantangan internal, terdapat pula faktor eksternal yang turut mempengaruhi ketimpangan dalam penyaluran bantuan Program Bekasi Sehat. Salah satunya adalah kurangnya sistem kelembagaan yang sistematis di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Struktur kelembagaan yang belum terorganisir dengan baik menyebabkan keterlambatan dalam proses distribusi serta ketidakseimbangan dalam penyaluran bantuan.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah rendahnya jiwa kewirausahaan di kalangan mustahiq, khususnya dalam program produktif. Banyak mustahiq masih memiliki pola pikir bahwa bantuan yang diterima hanya bersifat konsumtif, bukan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Akibatnya, program yang bertujuan untuk memberikan dampak berkelanjutan menjadi kurang efektif dalam meningkatkan taraf hidup penerima manfaat.⁵

Selain itu, minimnya pemahaman mustahiq mengenai aturan dan mekanisme program juga berkontribusi terhadap ketimpangan dalam distribusi bantuan. Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian besar penerima manfaat tidak mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan bantuan yang mereka terima.⁶ Hal ini membuat bantuan yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tujuan utama dari program tidak tercapai sepenuhnya.

Ketimpangan dalam penyaluran bantuan Program Bekasi Sehat menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, manajemen, serta sosialisasi program agar distribusi bantuan dapat lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi mustahiq di Kabupaten Bekasi.

3. Solusi Mengatasi Ketimpangan

Untuk mengatasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan Program Bekasi Sehat oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan berbagai langkah strategis yang mencakup perbaikan dalam aspek perencanaan, manajemen, dan sistem distribusi. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan kualitas perencanaan program agar lebih terstruktur dan berbasis data. Dengan perencanaan yang matang, penyaluran bantuan dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. BAZNAS Kabupaten Bekasi perlu mengembangkan sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi dengan instansi

⁴ Hadi, M. A. (2018). Analysis of factors that influence human resource management strategies in the National Zakat Agency (BAZNAS). *Jurnal Bening*, 5(2), 149. (<https://doi.org/10.33373/BENING.V5I2.1457>)

⁵ Rezeki, S. T. (2022). Peranan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2), 77. (<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1147>)

⁶ Irawan, H., & Permata, S. (2023). Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 185. (<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>)

terkait, sehingga identifikasi penerima manfaat dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu, penyusunan indikator keberhasilan yang jelas juga diperlukan agar efektivitas program dapat diukur secara objektif.

Selain dari aspek perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam program ini juga menjadi langkah penting. BAZNAS perlu merekrut dan melatih tenaga pendamping yang memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola bantuan sosial. Pendamping ini akan berperan dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak serta digunakan secara optimal. Selain itu, pelibatan relawan dan komunitas lokal juga dapat membantu mempercepat proses distribusi serta memberikan pemantauan yang lebih baik terhadap efektivitas program.⁷ Dengan adanya SDM yang memadai dan sistem monitoring yang lebih ketat, ketimpangan dalam penyaluran bantuan dapat diminimalkan.

Dari sisi mekanisme distribusi, BAZNAS Kabupaten Bekasi perlu memperbaiki sistem pengajuan bantuan agar lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat miskin. Penyederhanaan prosedur administrasi, seperti pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), harus dilakukan agar tidak menjadi hambatan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Disamping itu, sosialisasi program juga perlu ditingkatkan, baik melalui media sosial, kerja sama dengan perangkat desa, maupun melalui kunjungan langsung ke masyarakat.⁸ Dengan informasi yang lebih luas dan akses yang lebih mudah, mustahik yang selama ini kurang terjangkau dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapat bantuan.

Terakhir, transparansi dalam pengelolaan dana dan distribusi bantuan harus menjadi prioritas utama untuk menghindari ketimpangan dan potensi penyalahgunaan. BAZNAS dapat membangun sistem pelaporan yang terbuka, di mana masyarakat dapat memantau jumlah bantuan yang disalurkan serta siapa saja yang telah menerima manfaatnya. Penggunaan teknologi dalam sistem distribusi, seperti aplikasi pendataan mustahik atau platform online untuk pemantauan bantuan, juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas.⁹ Dengan sistem yang lebih transparan dan akurat, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat meningkat, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih efektif dan merata sesuai dengan tujuan awalnya.

SIMPULAN

Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam penyaluran bantuan Program Bekasi Sehat oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa perencanaan program yang kurang matang, keterbatasan SDM pendamping, serta belum adanya alat ukur yang jelas untuk menilai efektivitas program. Sementara itu, faktor eksternal mencakup sistem kelembagaan yang belum sistematis, rendahnya jiwa kewirausahaan mustahik, serta minimnya

⁷ Harahap, M. E. U. (2021). Efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3(2), 206 (<https://doi.org/10.24952/TAGHYIR.V3I2.3388>)

⁸ Irawan, A. W., Putro, H. K., Sifa', M. A., & Wahyudhi, I. (2023). Pendistribusian zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 3(1), 74-88 (<https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1954>)

⁹ Faizin, A. G. M., & Supriyadi, A. (2022). Evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Cakrawala Ilmiah (JCI)*, 1(11), 2997 (<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawailmiah.v1i11.2884>)

pemahaman mereka terhadap mekanisme program. Akibatnya, distribusi bantuan belum merata, transparansi masih menjadi tantangan, dan banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum terjangkau oleh program ini.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar lebih inklusif. Sosialisasi yang lebih luas juga harus dilakukan agar masyarakat miskin yang belum mengetahui program ini dapat mengakses bantuan dengan lebih mudah. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan distribusi harus diperkuat melalui sistem pelaporan terbuka dan pemanfaatan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, Program Bekasi Sehat dapat lebih efektif, merata, dan benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. (2024, November). At-Tazkiyah. BAZNAS Kabupaten Bekasi.
- Dewi, A., Himmawan, D., & Syathori, A. (2023). Analisis penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu. *JSEF*, 2(2), 100. (<https://doi.org/10.31943/jsef.v2i2.32>)
- Faizin, A. G. M., & Supriyadi, A. (2022). Evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Cakrawala Ilmiah (JCI)*, 1(11), 2997 (<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawailmiah.v1i11.2884>)
- Hadi, M. A. (2018). Analysis of factors that influence human resource management strategies in the National Zakat Agency (BAZNAS). *Jurnal Bening*, 5(2), 149. (<https://doi.org/10.33373/BENING.V5I2.1457>)
- Harahap, M. E. U. (2021). Efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3(2), 206 (<https://doi.org/10.24952/TAGHYIR.V3I2.3388>)
- Irawan, A. W., Putro, H. K., Sifa', M. A., & Wahyudhi, I. (2023). Pendistribusian zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 3(1), 74-88. (<https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1954>)
- Rakhmat, & Firdaus. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(2), 35.
- Rezeki, S. T. (2022). Peranan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2), 77. (<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1147>)
- Saputra, A. D. (2024). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kabupaten Bekasi (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*). 38